



Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia

Alhilal Yusril Hawari¹⁾ Utang Suwaryo²⁾ Dede Sri Kartini³⁾

^{1,2} Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

¹Korespondensi Penulis. E-mail: alhilalhawari122@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan dari peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam politik di Indonesia. Penelitian ini diteliti dengan cara penelitian Studi Kepustakaan atau disebut library research yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk melakukan penulisan, melakukan klarifikasi serta mengumpulkan data yang diambil dari banyak sumber baik itu sumber secara tidak tertulis maupun tertulis. dari yang telah diperoleh peneliti yang bersumber dari data tertulis. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan cara dokumentasi atau disebut (Studi Pustaka), melakukan kutipan dan melakukan analisis data dengan Teknik Dokumen ini bertujuan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data yang dimaksud yang ada didalam yang berasal dari dokumen-dokumen baik berbentuk dokumen tertulis seperti buku, jurnal, maupun sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki perannya masing-masing dalam politik yang ada di Indonesia baik itu sejak awal berdiri hingga sekarang, perbedaan tersebut dapat terlihat jelas dari beberapa perbandingan seperti ideologi, latar belakang, alasan pembentukan, dan orientasi, Temuan di dalam penelitian ini juga menunjukkan bagaimana Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia dan perbedaan ideologi yang memberikan dampak yang berbeda dalam politik.

Kata Kunci: Perbandingan Peran; Nahdlatul Ulama; Muhammadiyah

Abstract: This research aims to compare the role of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah in politics in Indonesia. This study belongs to library study research—a type of research conducted to write, clarify, and collect data from many reported data sources, both unwritten and written. The data were collected through the so-called literature study. Citing and analyzing data with this documentation technique aims to search, collect, and process data from written documents such as books, journals, and other written sources. The results revealed that NU and Muhammadiyah have depicted their respective roles in politics in Indonesia since their inception. The differences could be seen from several comparisons, such as ideology, background, reasons for formation, and orientation. Moreover, NU and Muhammadiyah have provided a tangible impact on Indonesian society. Subsequently, the differences in ideology have had a different impact in politics.

Keywords: Role Comparison; Nahdlatul Ulama; Muhammadiyah.

Article History:

Received : 2023-07-17

Revised : 2023-10-14

Accepted : 2023-10-20

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama atau (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan berbasis agama yang sangat besar yang ada di Indonesia. NU dan Muhammadiyah sendiri telah berdiri sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dimana NU berdiri pada 31 Januari 1926 dan Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912. NU dan Muhammadiyah telah melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang berkontribusi untuk Indonesia (Sudarno, 2009).

Peran yang telah diberikan oleh dua organisasi tersebut telah sangat memberikan dampak bagi kemerdekaan Republik Indonesia, dan banyak sekali tokoh atau pahlawan nasional yang

berasal dari dua organisasi tersebut. Beberapa contoh pahlawan nasional seperti K.H Ahmad Dahlan, Fatmawati Soekarno, Jendral Soedirman, K.H Fachrudin, Buya Hamka, K.H Mas Mansoer, K.H M Hasyim Asy'ari, KH Zainul Arifin, K.H Abdul Wahid Hasyim, K.H Abdurrahmah Wahid, Prof. Dr H. Amien Rais.

Pengertian dari *Civil Society* atau biasa disebut sebagai masyarakat madani adalah sebuah bentuk dari kelompok masyarakat yang diimpikan oleh negara yang berbentuk dan menerapkan demokrasi sebagai sebuah sistem. *Civil Society* sendiri digambarkan atau bermakna sebagai sebuah konsep dimana adanya sebuah ruang bagi individu-individu atau kelompok dalam suatu masyarakat untuk dapat saling berinteraksi dan juga dapat berpartisipasi dalam usaha pembentukan suatu kebijakan publik (Haryanto, 1982).

Pengertian *Civil Society* menurut Aristoteles sendiri bermakna bahwa *civil society* atau disebut (politik koinonia) memiliki arti masyarakat politik atau masyarakat negara, Sedangkan pengertian *civil society* menurut Gellner adalah *civil society* memiliki arti kepada sebuah masyarakat yang merupakan gabungan kelompok bukan bagi dari sebuah institusi melainkan mereka yang mandiri dan memiliki kekuatan untuk dapat setara dengan negara. Maksud dari setara disini memiliki arti yaitu kelompok yang berkekuatan untuk bertahan dari adanya intervensi yang dilakukan oleh negara atau *state* terhadap publik.

Pengertian *Civil Society* menurut Gaffar bahwa *civil society* itu bermakna sebagai suatu kondisi di masyarakat yang memiliki pemerintahan, kebebasan, ekonomi serta adanya organisasi yang dapat tumbuh secara otonom, dan satu semuanya saling berketergantungan ataupun bermakna sebagai suatu masyarakat yang sudah memiliki peradaban (*civility*) (Gaffar, 2002).

Penjelasan mengenai Ormas atau disebut organisasi masyarakat sendiri sudah diatur didalam UU No.17 Tahun 2013 terkait Organisasi Kemasyarakatan atau biasa disebut ORMAS yang dijelaskan didalam pasal kesatu ayat satu yang menyebut Ormas adalah suatu kelompok atau organisasi yang didirikan dan terbentuk oleh kelompok masyarakat secara tanpa paksaan dan atas kesamaan pendapat atau pemikiran, kesamaan keinginan, hal yang diperlukan, kesamaan maksud, kesamaan aktivitas dan harapan dalam proses partisipasi membangun bangsa Indonesia yang dilandaskan kepada Pancasila (Mubarak & Fis, 2016).

Selanjutnya, penjelasan dari tujuan atas pembentukan ormas yang dijelaskan didalam UU No.17 Artikel 5 Tahun 2013 menyebutkan dengan mendalam terkait maksud suatu ormas yaitu ada delapan, diantaranya adalah; 1) Meningkatkan peran bersama dan memberdayakan masyarakat 2) Memberi pelayanan bagi publik 3) Menjaga nilai-nilai kepercayaan serta keyakinan kepada Tuhan YME 4) Merawat dan menjaga etika, kebudayaan serta tata laku yang hadir dalam masyarakat 5) Menjaga dan mengembangkan alam dan kehidupan 6) Menerapkan kesetiakawanan secara sosial, saling toleransi, menjaga dalam lingkungan sosial 7) Merawat, melakukan pemeliharaan dan memperteguh kesatuan 8) menghadirkan cita-cita Negara.

Dalam pasal selanjutnya yaitu di dalam UU No.17 artikel 6 tahun 2013, membahas mengenai manfaat dari adanya organisasi kemasyarakatan. Manfaat dari ormas tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1) sebagai wadah untuk tempat berkembangnya kegiatan yang dimaksudkan untuk kepentingan organisasi. 2) Membina dan mengembangkan anggota untuk dapat menciptakan maksud serta tujuan dari organisasi masyarakat. 3) menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat. 4) Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. 5) Membantu terkait pelayanan publik. 6) menjadi wadah partisipasi bagi masyarakat untuk turut serta melakukan pemeliharaan, penjagaan, dan perkuatan kesatuan bagi bangsa dan negara. 7) Menjadi wadah pelindung dan melestarikan norma, melestarikan nilai, dan etika didalam proses berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan dan Fungsi dari Ormas menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013 adalah untuk

memperjelas bahwa organisasi kemasyarakatan digunakan untuk membantu mencapai tujuan dari suatu negara dan ormas menjadi pembantu pemerintah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ada.

Menurut penjelasan Haryanto dijelaskan bahwa yang disebut sebagai kelompok kepentingan adalah yang memiliki arti sebagai suatu kelompok yang beranggotakan dari beberapa orang yang mempunyai persamaan dalam ide, ketercapaian, hal yang ingin dilakukan untuk mengorganisasikan individu untuk kebersamai dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Haryanto, 1982).

Ada beberapa hal yang dapat disebut sebagai suatu organisasi kepentingan, yaitu; 1) organisasi anomik yaitu kelompok *interest* yang terorganisir dengan cara yang organik 2) Kelompok *interest* tidak terikat dimana kelompok ini tidak sering untuk berserikat secara formal dan sifat dari kegiatan yang dilakukan hanya sementara 3) Kelompok *interest* kelembagaan yaitu kelompok yang memiliki sifat formal dan memiliki rangkaian kerja politik serta sosial 4) Kelompok *interest* terlembaga yaitu kelompok yang memiliki tujuan yang tergabung dengan bagus dan terstruktur yang punya kegiatan yang sudah diatur dan sesuai dengan kepentingan dari maksud dari organisasi tersebut (M.A, 1993).

Dalam pandangan politik sendiri, Ormas dijelaskan sebagai sebuah kelompok yang memiliki sebuah tujuan atau *goals* bersama, kelompok kepentingan dikatakan berciri politis apabila melakukan tuntutan kepada institusi legal-formal. Masing-masing orang sendiri menjadi memiliki nilai dalam segi politik apabila ia masuk kedalam suatu kelompok kepentingan. Kelompok yang dimaksud ini sendiri akan menjadi organisasi yang dapat menghubungkan antara kelompok dengan kepentingan institusi (Kusumanegara, 2010).

Ormas masuk kedalam kelompok kepentingan assosiasional, yaitu kelompok yang terdiri dari buruh, pengusaha, kelompok agama dan kelompok lain. Ormas berbasis dan berbentuk agama yang memiliki pengaruh tingkat tinggi di Indonesia sendiri diantaranya adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Membahas mengenai Muhammadiyah, maka perlu mengetahui apa itu Muhammadiyah, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang berbentuk sebuah persyarikatan, disebut sebagai syarikat dikarenakan Muhammadiyah adalah suatu kelompok untuk berkumpul yang memiliki sejumlah pemahaman dalam satu rangkaian gerakan yang terdiri atas tempat yang menaunginnya yang disebut (jam'iyah), anggota (jama'ah) serta kepemimpinan yang disebut sebagai (imamah) (Ali, 2016).

Sejarah Muhammadiyah sendiri tercatat berdiri pada tahun 1912 di bulan november tanggal 18, keberadaan Muhammadiyah sebagai kelompok masyarakat atau CSO memfokuskan dirinya kepada beberapa bidang seperti bidang keagamaan, sosial serta pendidikan. Muhammadiyah juga telah menjalankan fungsi politiknya dengan berkiprah dalam pergerakan kemedekaan kebangsaan, dan membantu menempatkan dasar negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Boy, 2009).

Pengertian Muhammadiyah menurut Mitsuo Nakamura, bahwa sejak berdirinya Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan telah memberikan kontribusi positif dan mencirikannya sebagai suatu *civil society* itu sendiri, seperti; Satu, Muhammadiyah membuat sebuah persatuan dengan langkah turut serta mendirikan dan mengembangkan keberadaan dari negara Indonesia. Kedua, Muhammadiyah merupakan sebuah tempat untuk memiliki peran dalam usaha pengembangan ide masyarakat secara organik. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti K.H Ahmad Dahlan, K.H Mas Mansur, Kahar Muzakkar, Ki Bagus Hadikusumo, Panglima Soedirman, Singodimerjo, Buya Hamka adalah *founding father* bangsa yang terkenal akan kiprahnya dalam pembangunan di negara Indonesia.

Nahdlatul Ulama sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan islam yang dikatakan terbesar di Indonesia, berdirinya Nahdlatul Ulama ini diprakarsai oleh Kyai Hasyim Asy'ari

serta limabelas kiai ternama yang berunding di rumah K.H Wahab Hasbullah yang berada pada wilayah Kertopaten Surabaya. Para ulama memutuskan bahwa Nahdlatul Ulama tersebut untuk sebagai perwakilan dan usaha memperkuat Islam tradisional yang ada di wilayah Hindia Belanda dan merupakan organisasi tingkat nasional (Haidar, 1998).

Ada tiga alasan dari lahirnya Nahdlatul Ulama yaitu; 1) Sebagai gerakan perubahan dan baru yang ada di Indonesia 2) Sebagai peran untuk politik 3) Karena adanya pengaruh dari timur tengah, Nahdlatul Ulama sendiri adalah sebuah organisasi berbasis agama, memiliki pengaruh Islam yang didirikan dan dimulai oleh para kiai yang memiliki ideologi kepada *Ahlussunah Wal Jama'ah* yang dinisiasi untuk tempat melakukan kegiatan dalam kesatuan dan menyatukan arah gerak dalam upaya arahan pemeliharaan, pelestarian, dan pengembangan dan juga untuk melakukan kegiatan keislaman dan ajarannya dengan mengacu kepada satu dari beberapa banyak imam mazhab baik itu imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i ataupun imam Hambali. Dan juga berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat Islam (Ekawati, 2016).

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana Perbandingan Peran dari NU dan Muhammadiyah khususnya dalam bidang Politik yang terjadi di Indonesia. Karena kita mengetahui bahwa banyak pemimpin hebat bangsa ini yang lahir dari dua organisasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan cara pendekatan melalui penelitian Pustaka atau (*Library Research*) yang berarti penelitian dengan cara melakukan penulisan, melakukan klarifikasi dan menyimpulkan dan menampilkan data dari data yang telah dikumpulkan seperti data ideologi, data latar belakang, data pendiri, orientasi, tahun berdiri, mazhab, bentuk, fokus bidang, amal usaha, peran dalam demokrasi dan data bentuk ijtihad partai politik yang dikumpulkan melalui ragam sumber tertulis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik dokumen atau (Studi Pustaka). Meneliti dan melakukan analisis data dengan Teknik Dokumen ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait yang ada didalam sumber tertulis baik berupa buku, jurnal maupun hasil penelitian lainnya.

HASIL PEMBAHASAN

Peran Politik

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Menurut (Soekanto & Sulistyowati, 1982) peran merupakan pola perilaku yang terkait dengan status, apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka dianggap telah menjalankan peran. Peranan sangat penting karena peranan itu mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang berada pada batas-batas tertentu. Menurut Levinson dalam (Prof. Dr. Soerjono Soekanto, Dra. Budi Sulistyowati, 1982) bahwa peranan mencakup tiga hal:

- a. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b. Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran merupakan suatu kedudukan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya. Peranan menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Setiap peranan bertujuan supaya antar individu yang melaksanakan peranan terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.

Definisi politik secara umum menurut (Budiardjo, 2003) adalah bermacam-macam

kegiatan dalam satu sistem politik (negara) yang menyangkut proses-proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan umum publik menyangkut pengetahuan dan pembagian sumber-sumber yang ada.

Peran politik dapat disimpulkan sebagai fungsi seseorang dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan dari sistem politik. Proses menentukan dan melaksanakan tujuan menyangkut perilaku penting yang dilakukan bagi kepentingan orang banyak. Seseorang yang mempunyai peran dalam politik memiliki kebijakan sebagai bentuk respon terhadap sistem politik yang ada dengan menyesuaikan pada lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Peran Muhammadiyah dalam Politik

Muhammadiyah dalam waktu usaha pembentukannya hingga sekarang memiliki tujuan yang berbeda, dalam fase pertama memiliki tujuan Religius-Kultural (1912-1937) dengan fokus cara kultural dengan ruang gerak berdasarkan keagamaan. Usaha yang dilakukan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tahun 1912-1937 bersama tokoh-tokoh dari Muhammadiyah yang lain adalah dengan melakukan dakwah kultural secara keagamaan dengan cara melawan praktik-praktik syirik, bid'ah, tahayul hingga khufara serta berusaha untuk memerangi kebodohan dan keterbelakangan yang terjadi.

Berlanjut pada fase kedua dengan orientasi Politis-Struktural pada tahun 1937-1971, dimana disini berfokus kepada pengaturan taktik politik secara strukturalis, yaitu taktik yang dimulai oleh K.H Mas Mansyur. Dengan menghadirkan Muhammadiyah sebagai sebuah langkah politik layaknya PII serta MIAI. Serta tidak menyetujui adanya aturan Saikerie yang terjadi ketika jepang menduduki Indonesia. Serta hadirnya tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam BPUPKI dan PPKI untuk membantu merumuskan dasar negara Indonesia. Serta mendirikan Parmusi ketika awal zaman orde baru

Selanjutnya, di fase ketiga Muhammadiyah dengan orientasi Sosial-Kultural ketika tahun 1971-1995 menggunakan taktik dasar, dengan cara dakwah secara kelembagaan yang memiliki tujuan yang berfokus kepada bidang pengembangan masyarakat. Dimana ini diawali dengan adanya taktik khittah ujung pandang pada tahun 1971 yang membuat Muhammadiyah harus netral dalam politik dan juga saat itu ketika dipimpin oleh A.R Fachruddin berfokus kepada pengembangan amal usaha (Jurdi, 2011).

Muhammadiyah adalah sebuah langkah islam dengan dakwah amar ma'ruh nahi munkar yang memiliki pedoman kepada islam yang didasari pada Al-Quran serta Sunnah. Dan tidak tergabung kepada ajaran teologis, mazhab fikih serta tariqat sufiyah.(Wahyuding & Hasan, 2021). Muhammadiyah mengembalikan diri kepada Al-Quran dan Sunnah menjadi sebuah langkah diri untuk membeskan insan dari adanya primordialisme pemahaman dan taklid yang menjadi pembelenggu kreativitas dalam berijtihad. Ciri dari Muhammadiyah sendiri adalah tajdid, toleransi, terbuka dan tidak bermahzab (Muhammadiyah, 2002).

Berlanjut di fase keempat dengan orientasi Politis-Kultural yang berlangsung pada tahun 1995-1998. Disini Muhammadiyah berorientasi politis pada ruang geraknya dan saat itu dibawah kepemimpinan Amien Rais, dimana Amien Rais menjadi oposisi dan kritis terhadap kepemimpinan Soeharto dimana dengan kebijakannya menentang terkait aturan 5 hari sekolah dan 2 hari tidak sekolah serta adanya kebijakan kesamaan sepatu sekolah yang akhirnya dipuncaki dengan hadirnya Reformasi 1998. Din Syamsudin mengkategorikan politik Muhammadiyah sebagai politik alokatif, yang berarti bahwa sebuah siklus bergerak yang dilakukan dengan menggerakkan poin keilmuan islam kedalam tata cara politik untuk melakukan siar *amar maruf nahi munkar* yang memiliki arti usaha untuk memberikan ajakan kepada manusia agar meninggalkan kesalahan dan terus mendekati kepada kebenaran. Dan

juga sebagai untuk terus ikut berproses dan responsive terhadap upaya untuk memberikan efek pada diri dan upaya pemantauan terhadap pembentukan aturan dan pemerintahan yang ada (Nasir, 2006).

Muhammadiyah sendiri memposisikan organisasinya menjadi sebuah kelompok yang memiliki kepentingan (*interest group*) serta sebagai kelompok penekan atau (*pressure group*). Perbedaan antara Muhammadiyah dengan partai politik adalah bahwa parpol dapat memberikan efeknya pada institusi formal dengan cara memberikan kesempatan kadernya untuk jabatan politik, sedangkan organisasi penekan menggunakan cara yang lebih mengajak dan menggunakan teknik seruan dalam bentuk promosi seperti propaganda didalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan yang ada di pemerintahan, Muhammadiyah juga dianggap oleh sebagian masyarakat lebih memiliki dampak dalam upaya mewakili aspirasi rakyat dibandingkan partai politik (Nashir, 2011).

Muhammadiyah sendiri dalam menjalankan fungsi politiknya melakukan ijtihad politik melalui persentuhan dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Ini semua diawali yang berasal berdasarkan amanat tanwir semarang yang mensyaratkan adanya persyarikatan dan melakukan fungsi politik. Alasan dari adanya persentuhan antara Muhammadiyah dengan PAN sendiri adalah karena para pendiri dan kader dari PAN mayoritas adalah orang Muhammadiyah (Jinan, 2004).

Muhammadiyah dengan PAN sendiri dikatakan memiliki hubungan yang istimewa, dapat dilihat ketika Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tahun 2004. Dimana pada tahun tersebut Muhammadiyah menggambarkan dan memberikan pengetahuan kepada ummat untuk memilih PAN sebagai perwakilan mereka. Hal ini berdasarkan Rapat Pleno yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengeluarkan ajakan yang mengatakan untuk memilih serta mendukung partai yang memberikan kesempatan untuk calon-calon dapat dimenangkan oleh Muhammadiyah serta memilih anggota DPD yang mendapatkan rekomendasi oleh Muhammadiyah (Syahputra, 2019).

Dari pilpres 2004, menurut Jinan bahwa Muhammadiyah telah menjadi “Mesin Politik” yang bersumber kepada pragmatisme politik. Pragmatisme dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penyimpangan dari arahan pemimpin wilayah utama dan pemimpin wilayah bagian Muhammadiyah mengenai Khittah Ujung Pandang pada tahun 1971 yang dipertegas oleh Khittah Denpasar tahun 2002 (Jinan, 2004).

Muhammadiyah sendiri dalam berpolitik bergerak kepada arah kemanusiaan, fokus pada masalah sosial, serta tidak menyetujui hadirnya penyimpangan yang ditimbulkan oleh penguasa yang berlaku. Muhammadiyah memberikan dukungan kepada kekuasaan yang memperhatikan dengan serius terhadap permasalahan keadilan, perbaikan ekonomi-sosial masyarakat dan perbaikan praktik KKN. Muhammadiyah dalam gerakan moralnya memiliki kepentingan agar pemerintahan yang berjalan tetap berjalan lurus dalam ranahnya. Dan memiliki orientasi atau tujuan kepada masyarakat serta berupaya untuk tidak merugikan negara. Muhammadiyah dapat mengambil sikap responsive dan kritisnya sebagai interest group ketika kekuasaan atau pemerintahan jauh dari adanya prinsip keadilan serta tidak benar atau tidak serius dalam upaya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat (Rusydi, 2017).

Muhammadiyah juga dalam upaya membantu masyarakat pernah melakukan peninjauan kembali terkait hukum terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 yang membahas terkait minyak dan gas atau disebut dengan Undang-Undang Migas. dimana Muhammadiyah disini menilai bahwa ini mengakomodir kepentingan dari perusahaan internasional untuk dapat melakukan bisnis migas di Indonesia. Proses advokasi yang dilakukan terhadap UU ini mencapai hingga waktu 6 bulan hingga akhirnya mendapatkan keputusan di tahun 2012 pada tanggal 13. Dimana

MK menyetujui terhadap permohonan dari pasal-pasal yang dilakukan gugataan oleh Muhammadiyah. Hasilnya adalah organisasi BP Migas dihentikan dan diakhiri dan akhirnya presiden membentuk Satuan Kerja Migas yang berada di naungan dari Kementerian ESDM yang disahkan sejak November 2012 (Nashir, 2011).

Peran Nahdlatul Ulama dalam Politik

Perjalanan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa terbagi menjadi tiga periodisasi, yaitu pertama pada masa reaktif-defensif (1926-1952). Dalam periode atau masa ini Nahdlatul Ulama lebih memperlihatkan diri atas peran dari ulama. Tipologi gerakan dari Nahdlatul Ulama sendiri berfokus kepada gerakan keagamaan dan politik. NU lebih bertahan dan memantau terlebih dahulu untuk menghadapi organisasi modern dengan cara gerakan pembaharuan-pemurniannya bersejalan dengan cara dari organisasi yang bergerak masih dengan ciri lama dan belum bersifat modern dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama atau (NU), Selanjutnya ada masa pertahanan-politik pada tahun 1952 hingga 1984. Didalam masa tersebut para petinggi dari Nahdlatul Ulama melakukan gerakan “Ijtihad politik” untuk dapat bisa berpartisipasi dalam politik dan NU menjadikan dirinya partai politik setelah tidak terlagi tergabung dengan Masyumi (1952). Dalam pemilu yang diselenggarakan tahun 1955 Partai yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama berhasil untuk menempati posisi ketiga dan berada pada posisi dibawah PNI serta Masyumi. Perpolitikan NU ini berhasil mengantarkan anggota terbaik dari NU seperti K.H Wahid Hasyim dan K.H Saefudin Zuhri menjadi Menteri agama yang dikatakan “Menguntungkan” dalam meligitimasi paham keagamaannya. Terakhir, di periodisasi ketiga yang dimulai pada (1984-sekarang). Tipologi gerakan NU mulai ada pergeseran tujuan politik kepada dasarnya yaitu khittah 1926 berdasarkan Mukhtamar ke-27 di Situbondo 1984. Dalam masa ini yang dikenal sebagai periode kiai-intelektual sukses untuk menaikkan pamor NU (Feillartd, 1999).

Dalam menjalankan perannya di politik, Nahdlatul Ulama sejak didirikan pada 1926 hingga sekarang selalu terlibat didalam kancah politik indonesia secara peran aktifnya maupun peran dibelakangnya. Nahdlatul Ulama berperan sebagai partai politik sejak tahun 1952 hingga menjadi fungsi-fungsi keislaman yang ada seperti di PPP pada tahun 1973. Hal ini menunjukkan sebuah rangkaian alur sejarah panjang dalam politik di Indonesia. Namun pada 1984, NU mengambil keputusan untuk keluar dari PPP dan kembali ke origin awalnya sebagai organisasi agama yang memiliki fokus kepada kegiatan pelayanan publik, sosial serta politik dan demokrasi. Namun, dalam tahun reformasi, NU Hadir sebagai organisasi dengan adanya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang diketuai oleh Abdurrahman Wahid (L. Man, 2018).

Melihat dari pemilu pertama yang diselenggarakan di tahun 1955 Nahdlatul Ulama dapat dilihat mampu untuk menunjukkan kemampuannya dalam menggalang solidaritas di kalangan kaum santri dan sebagai upaya memenangkan ideologi islam dan menunjukkan sikap anti-komunis. Ada tiga pilar utama yang menjadi penyangga dari Nahdlatul Ulama, yaitu; Ulama, Pesantren, Politisi, Nahdlatul Ulama juga menggunakan pendekatan yang memiliki sifat praktis, parsial dan gradual (Muhammad, 2017).

Nahdlatul Ulama sesuai dengan hasil Mukhtamar ke -27 yang dilaksanakan di Situbondo, mengambil keputusan untuk tidak lagi menjadi partai politik dan kembali ke awal tujuan dibentuk mengikuti adanya khittah 1926 yang ditegaskan bahwa NU berperan untuk kegiatan sosial, agama serta pendidikan Visi dari NU dalam melaksanakan politik yaitu memiliki pemahaman akan bangsa dan melaksanakan kesatuan bangsa bersama-sama untuk dapat menjadikan bangsa yang adil dan sejahtera.

Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan selalu menyamakan dirinya bersamaan dengan publik. kekompakkan itu menunjukkan peran kuat lembaga atau institusi dalam melaksanakan perkembangan agama islam dan juga untuk masyarakat islam. Dan ujungnya

bahwa institusi bersama yang didalamnya terdapat sumber daya manusianya harus fokus kepada isu pendidikan. Pesantren sendiri sebagai institusi pendidikan dengan basis agama, memiliki potensi besar, potensi tersebut diantaranya;

1. Budaya paguyuban didalam pesantren yang dikelola dengan modern dapat menjadi kekayaan yang mahal
2. Masyarakat yang ada di dalam institusi pendidikan pesantren masih banyak yang belum terpengaruh oleh budaya luar baik dari pemikiran, ide, serta hati dibandingkan dengan publik yang sudah mengenal kebudayaan moderen
3. Masyarakat pesantren dapat mengetahui sejarah bangsa secara kultur atau budaya yang membuat pemahaman akan akar bangsa yang berguna untuk dapat lebih dekat dengan masyarakat
4. Pesantren dapat menjadi potensi basis ekonomi kerakyatan
5. Pesantren dapat menjadi contoh kecil dalam penerapan demokrasi dan contoh kedaulatan dalam suatu negara (Moesa, 1999)

Nahdlatul Ulama ikut dalam berpartisipasi terkait gerakan politik sesuai dengan GBHN / Garis Besar Haluan negara sebagai salah satu cara untuk turut serta dalam pembangunan politik di masyarakat dan bangsa yang sesuai dengan berpedoman kepada Pancasila untuk menghadirkan demokrasi Pancasila dengan sempurna. Pedoman bagi masyarakat NU dalam berpolitik adalah

- 1) Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan politik memiliki pengertian bahwa peran aktif masyarakat dalam turut berpartisipasi dalam kehidupan negara serta bangsa itu dilandaskan atau mengacu kepada UUD 1945 dan Pancasila
- 2) Nahdlatul Ulama dalam berpolitik memiliki ide atau gagasan atau dasar yaitu memiliki pemahaman terhadap kesatuan serta persatuan bangsa, dan memiliki wawasan atau ilmu kebangsaan, dengan langkah yang dilakukan menjunjung tinggi sila ketiga yaitu persatuan dan kesatuan agar dapat mewujudkan cita-cita masyarakat secara kolektif yaitu masyarakat yang sejahtera, makmur dan berkeadilan. Baik secara lahiriah dan batiniah yang berfokus kepada ibadah yang dituju untuk mencapai kebahagiaan dunai akhirat.
- 3) Nahdlatul Ulama dalam berpolitik adalah mengembangkan nilai berdasarkan kemerdekaan yang telah diperjuangkan baik secara hakikatnya maupun demokratisnya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap bangsa serta untuk memberikan pemahaman terkait hak, kewajiban serta tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan bersama.
- 4) Nahdlatul Ulama dalam berpolitik melaksanakannya berlandaskan etika, moral, kultur dan menjunjung ketuhanan yang maha esa, berprikemanusiaan yang adil dan beradab serta menjunjung persatuan Indonesia dan berkerakyatan serta adanya keadilan sosial bagi seluruhnya
- 5) Nahdlatul Ulama dalam berupaya memecahkan masalah kebangsaan dilakukan berdasarkan nilai nilai kejujuran, mengikuti norma, nilai ajaran agama, berdasarkan konstitusi, berpilaku adil, sesuai dengan aturan yang telah diatur dan secara bermusyawarah
- 6) Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan politiknya dilakukan secara bersama untuk menempuh consensus secara nasional, dilaksanakan berdasarkan akhlakul karimah sebagai pengamalan dari ajaran islam yang Ahlussunah wal Jamaah
- 7) Nahdlatul Ulama dalam berpolitik berupaya melakukannya untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama tanpa adanya perpecahan, khususnya menggunakan dalih untuk memecah bangsa dan umat

- 8) Nahdlatul Ulama apabila memiliki perbedaan penilaian atau pandangan didalam menyampaikan pendapatnya secara politik harus saling toleransi dan menghargai, karena merupakan satu saudara dan harus bertawadhu serta menghargai antar umat NU untuk menjaga persatuan yang telah dibangun
- 9) Nahdlatul Ulama dalam berpolitik menginginkan adanya komunikasi yang bermanfaat yang memiliki dampak bagi pembangunan negara untuk menciptakan suatu keadaan yang dapat membangun dan bersifat mandiri serta dapat menjangkau aspirasi dari masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara (Www.nu.or.id, 2023)

Peran Nahdlatul Ulama dalam Demokrasi di Indonesia

Demokrasi dalam pemahaman NU secara nilai-nilainya sudah tergambar didalam cara pandang masyarakat NU, yakni pertama adalah *tawazun* (beraturan dan berimbang) dan yang kedua adalah *tawassuth* (bahwa NU memiliki cara yang tidak kaku dan tidak bersifat ekstrim), ketiga adalah *tasamuh* (bertoleran) dan keempat adalah *I'tidal* (berkeadilan) dan kelima adalah *amar maruf nahi munkar*.

Demokrasi sendiri diartikan didalam suatu proses politik untuk dapat memiliki pemimpin untuk mengurus dan melakukan pekerjaan formal seperti formalitas dalam proses pemerintahan. Demokrasi sendiri diartikan sebagai sebuah sikap menghargai, toleran dan bertanggungjawab. Prinsip-prinsip NU dalam hal bermasyarakat dijelaskan secara rinci didalam *Fikrah Nahdliyah*, yaitu memiliki kesamaan sebelas pilar demokrasi seperti yang dijelaskan oleh USIS. Hal ini menunjukkan bahwa NU telah menanamkan, memahami dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi itu sudah dari lama. Dimana berarti NU menempatkan diri sebagai sebuah organisasi yang menerima nilai-nilai demokrasi (Culla, 1999).

Berkaitan dengan Indonesia, perihal demokrasi, NU menerima Demokrasi dan Pancasila untuk menjadi dasar negara, dikarenakan menurut penilaian NU bahwa hal tersebut tidak memiliki perdebatan atau pertentangan terhadap agama islam. NU pun selalu menerima hadirnya pemimpin apapun asal seorang pemimpin tersebut bukanlah orang yang batil, dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap orang lain sebagai seorang muslim yang beragama. Dalam konteks NU dalam upaya pendidikan demokrasi adalah dengan memberikan pengetahuan terkait hak-hak nya, definisi dari hak tersebut adalah sudah dijelaskan secara rinci didalam kitab tentang bagaimana memelihara terkait agama atau yang disebut dengan *Hifdzh addin* didalam *Maqosih asy'ariyha* juga terkait bagaimana kita dapat melakukan pemeliharaan terkait manusia dan jiwanya atau *hifz An-Nafs*, memelihara pikiran (*hifz al-aql*) memelihara kekayaan (*hifzh al-mal*).

Dalam bentuk pendidikan demokrasi selanjutnya di dalam NU adalah dengan hadirnya lembaga untuk membahas permasalahan yang hadir dipublik yang bernama *Bahtsul Masail* yang dimiliki oleh NU yang merupakan tempat untuk berkumpulnya antara kiyai dan santri untuk dapat berpendapat dan berargumen dalam upaya memecahkan masalah kompleks yang terjadi kini. Dalam *Bahtsul Masail*, nilai-nilai yang kita dapat resapi untuk diambil adalah nilai *tawassuthiyah* (bersikap secara moderat), *tasamuhiyah* (melakukan sikap saling menghargai), *tashawurriyah* (berfikir untuk masyawarah), *islahiyah* (reforma) dan *tathowwuriyah* (berdinamis).

Program demokrasi selanjutnya yang ada di NU adalah *lailatul ijtima*, pengajian ini biasanya dilakukan di malam hari dengan membahas topik permasalahan kontemporer, dengan hadirnya pengajian untuk mempertegas kehadiran NU sebagai suatu organisasi di masyarakat serta organisasi agama yang memiliki fokus terhadap adanya bentuk masyarakat madani NU sebagai organisasi terdepan akan menjadi negara yang demokratis. NU juga memiliki lembaga yang melakukan kajian isu kekinian dan juga isu demokrasi yang disebut LAPKESDAM.

Ada dua cara yang dilakukan oleh NU agar menjadikan warganya menjadi warga yang

demokratis, yaitu pertama adalah cara formal, yang memiliki maksud dengan cara melalui program-program NU, lalu cara kedua, adalah dengan cara non-formal yaitu dengan cara melalui pendidikan pesantren, teladan kyai dan akhlak. Dan dalam upaya menyebarkan wawasan demokrasi, NU menyampaikannya melalui berbagai lembaga dakwah dan pendidikan NU seperti GP Anshor, Ikatan Pelajar para Putri NU, Lembaga pendidikan seperti Ma'arif NU dan lembaga perhimpunan guru NU.

Peran Muhammadiyah dalam Demokrasi di Indonesia

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang bergerak berlandaskan Islam dengan cara dakwah amar maruf nahi munkar dan tajdid. Dalam langkahnya, Muhammadiyah berlandaskan atau memiliki sumber berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang diketahui sebagai suatu identitas dalam berjuang. Dalam berpolitik juga Muhammadiyah berusaha memberikan makna mendasar berdasarkan prinsip-prinsip amar maruf nahi munkar. Pengalaman terlibat didalam politik praktis menjadi pelajar berharga yang dialami oleh Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam berpolitik adalah tugas mu'amalah dunyawiyah yang wajib dilaksanakan dalam konteks melaksanakan pemahaman islam serta berkehidupan untuk umat dan kebangsaan. Muhammadiyah dalam melaksanakan politik yaitu keeluasaan ide yang bersandar kepada nilai-nilai ideologis agama, yang memiliki arti yaitu ajaran yang sudah ditulis di dalam islam wajib dijalankan didalam politik. sebaliknya yaitu harus menghindari apabila hal tersebut dilarang (Muhammadiyah.or.id, 2023).

Muhammadiyah juga dalam berpolitik memiliki pandangan yang sudah secara tegas dikatakan didalam Khittah atau pertemuan di Denpasar pada tahun 2002. Dalam khittah tersebut menjelaskan bahwa dalam berpolitik pemahaman atau ajaran harus diterapkan dalam satu tarikan nafas islam, dikarenakan dengan berpolitik maka membuka jalan untuk usaha membangun bersama kehidupan kebangsaan.

Muhammadiyah juga selalu memberikan kesempatan kepada para calon atau kader atau binaannya untuk dapat memberikan dampak dalam kemaslahatan umat bersama. Muhammadiyah juga membantu umatnya maupun kader binaannya untuk berkontestasi dalam kehidupan politik di Indonesia. dengan tujuan untuk bisa memperluas gagasan Muhammadiyah di masyarakat. Muhammadiyah juga memiliki ideologi politik adiluhung atau politik tinggi (*high politics*) yang melakukan penekanan pada beretika secara moral dan secara agama kedalam setiap individu muslim. Hal itu dilaksanakan oleh setiap kader Muhammadiyah dengan cara dihadapkannya pendidikan secara islam untuk memperkuat moral dan integritas diri.

Faktor-faktor yang mendukung dan mengisyaratkan para pemimpin dari Muhammadiyah untuk melakukan koneksi dengan partai politik itu secara dasar diberikan pengaruh oleh faktor identitas primordial yaitu karena adanya kedekatan secara personal, lalu selanjutnya adalah faktor kedekatan dengan elit atau tokoh.

Tabel 1. Perbandingan NU dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia

Perbandingan	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah
IDEOLOGI	<i>Ahlussunah Wal Jama'ah</i> (sebuah usaha untuk mempersatukan umat dan menyamakan langkah bergerak untuk melakukan tugas menjaga, memelihara, mengembangkan, menjaga kelestarian dan proses pengamalan ajaran islam serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad S.A.W dan juga dengan merujuk kepada salah satu	<i>amar maruf nahi munkar</i> (Sebuah langkah bersama untuk mengajart umat manusia terhadap kebenaran serta upaya untuk menghindari dan meninggalkan kemaksiatan atau kemungkaran)

imam mahzab)		
Tabel 1. Perbandingan NU dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia (lanjutan)		
Perbandingan	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah
LATAR BELAKANG	1) Sebagai sebuah gerakan baru atau pembaharuan di Indonesia 2) Sebagai sebuah kepentingan akibat politik 3) Karena hadirnya Perkembangan yang terjadi di timur tengah	1. Melakukan dakwah kultural secara keagamaan dengan cara melawan praktik-praktik syirik, bid'ah, tahayul hingga khufara 2. Usaha untuk memerangi kebodohan dan keterbelakangan yang terjadi
PENDIRI	Kyai Hasyim Asy'ari	K.H Ahmad Dahlan
ORIENTASI ISLAM	Tradisionalis	Moderat
TAHUN BERDIRI	31 Januari 1926	18 November 1912
MAZHAB	Imam Hanafi, Imam maliki, Imam syafi'i ataupun Imam hambali	Tidak Bermazhab
BENTUK	Organisasi Keagamaan	Organisasi Keagamaan, Persyarikatan
FOKUS BIDANG	bidang keagamaan, sosial serta pendidikan	bidang keagamaan, sosial serta pendidikan
AMAL USAHA	Rumah Sakit, Sekolah, Pesantren	Rumah Sakit, Sekolah, Madrasah Mu'allimin
PERAN DALAM DEMOKRASI	Lembaga Bahtsul Masail, Pengajian <i>Lailatul Ijtima</i> , (Lembaga Pemberdayaan Sumber Manusia) Lapkesdam, Muslimat NU, Ikatan Pelajar NU, Ikatan Putri NU, Ikatan Sarjana NU, Lembaga Pendidikan <i>Ma'arif</i> NU, GP Ansor	High Politics (Politik Adiluhung) dengan menerapkan etika moral agama dalam individu muslim dalam berpolitik, Low Politicis, dengan melakukan pendekatan dengan tokoh atau partai politik
IJTIHAD PARTAI POLITIK	PPP (1973-1984) PKB (Masa Reformasi)	PAN (2004)

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

SIMPULAN DAN SARAN

Peran dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam politik di Indonesia dapat dilihat dari berbagai periodisasi yang telah disebutkan diatas. Bahwa Nahdlatul Ulama terbagi menjadi tiga periode, pada periode pertama adalah masa antara pesantren atau tempat belajar islam dengan guru pada tahun 1926 hingga tahun 1950an lalu ada masa kyai bersama dengan para elit politik di tahun 1950an hingga 1984, dan terakhir antara akademisi dengan kyai atau guru pada 1984 hingga saat ini.

Sementara periodisasi organisasi Muhammadiyah terbagi empat, yaitu fase pertama dengan Orientasi Religius-Kultural (1912-1937) dengan fokus strategi kultural dengan ruang gerak berdasarkan keagamaan, fase kedua dengan orientasi Politis-Struktural pada tahun 1937-1971, dimana disini berfokus kepada strategi politik secara strukturalis, fase ketiga Muhammadiyah dengan orientasi Sosial-Kultural ketika tahun 1971-1995 menggunakan taktik mendasar, dengan cara dakwah secara budaya yang memiliki tujuan yang berfokus kepada permasalahan kemasyarakatan, fase keempat dengan orientasi Politis-Kultural yang berlangsung pada tahun 1995-1998.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai *Civil Society* juga telah banyak membantu masyarakat baik dalam bidang pendidikan dengan mendirikan insitusi-institusi pendidikan seperti Pesantren, Universitas, sosial dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, mendirikan panti asuhan, maupun keagamaan. Banyak tokoh-tokoh penting bangsa ini yang berasal dari NU dan Muhammadiyah. Seperti Presiden ke-4 Gusdur, Wakil

Presiden Ma'ruf Amin, Prof.Dr.H Amien Rais yang pernah turut andil dalam gerakan '98. Dan tokoh-tokoh besar bangsa lainnya.

Peran para kader NU dan Muhammadiyah juga ada di lingkup pemerintahan sekarang, yaitu seperti Prof. Dr. Muhadjir Effendy sebagai Menko PMK, Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN. Wakil Presiden Maruf Amin dan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama.

Walaupun NU dan Muhammadiyah memiliki beberapa perbedaan baik dari segi ideologi, latar belakang alasan pembentukan, dan Orientasinya. Namun, NU dan Muhammadiyah sebagai *civil society* sama-sama telah membantu Negara khususnya pemerintah sesuai dengan tujuan yang sudah diatur dari UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas yaitu telah membantu mempermudah kerja pemerintah dalam pencapaian tujuan negara, NU dan Muhammadiyah sendiri telah menjadi agen pemerintah dalam melakukan program-program dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Membedah Tujuan Pendidikan Muhammadiyah. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 17(01), 43–56. <https://doi.org/10.23917/profetika.v17i01.2099>
- Boy, P. (2009). *PAN, PMB, MUHAMMADIYAH*.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Culla, A. S. (1999). *Masyarakat Madani: Pemikiran Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Raja Grafindo Persada.
- Ekawati, E. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Civil Society di Indonesia. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 13(2), 233. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1098>
- Feillard, A. (1999). *Nahdlatul Ulama dan Negara: Fleksibilitas, Legitimasi dan Pembaharuan*. LKIS.
- Gaffar, A. (2002). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Haidar, M. A. (1998). *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto. (1982). *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Jinan, M. (2004). *Muhammadiyah dalam Bayang-Bayang Politik Praktis*. Media Indonesia.
- Jurdi, S. (2011). Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006. *Tajdid*, 9(1), 127–132.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- L. Man, Y. (2018). Urgensi Nahdlatul Ulama Dalam Pemerintahan Indonesia. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 142. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2148>
- M.A, M. dan C. (1993). *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press.
- Moesa, A. M. (1999). *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*. LEPKISS.
- Mubarak, A., Ip, S., & Fis, P. I. I. (2014). Peran Ormas dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan. *Seminar Nasional UT* (Vol. 23).
- Muhammad, F. (2017). Dinamika Pemikiran Dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama. *Kalam*, 10(2), 57. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.320>
- Muhammadiyah, S. T. (2002). Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Suara Muhammadiyah*, (4).
- Muhammadiyah.or.id. (2023). *Posisi Pendapat Mazhab dalam Muhammadiyah*.
- Nashir, H. (2011). *Muhammadiyah Abad Kedua*. Suara Muhammadiyah.
- Nasir, H. (2006). *Dinamika Politik Muhammadiyah*. UMM Press.

- Rusydi, R. (2017). Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh). *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 139–148. <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.367>
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (1982). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Press.
- Sudarno, S. (2009). *Muhammadiyah dan NU Dalam Pentas Politik Nasional*. Surakarta Muhammadiyah University Press UMS.
- Syahputra, H. (2014). Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–30.
- Wahyuding, W., & Hasan, H. (2021). Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22330>
- Www.nu.or.id. (2023). *Pedoman Berpolitik Warga NU*.